

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Muhammad Zainul. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.
- Efendi, Roni. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Faisal. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hasan Hanif, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).
- Ilyas, Adam. *Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Krismen, Yudi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Kristiana Yudi. *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Lawra, Rifqi Devi, et al. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Nelson, Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2015.
- Setiyawan, Wahyu Beni Mukti, et al. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.

Soejono, H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rianeka Cipta, 2005.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sofyan, Andi. Abd, Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Jurnal

Ahwan and Yuni Ristanti, “Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK: Sebuah Penelusuran Teoretis”, *Jurnal Yalamqa Ganec Swara* 19, no. 2, (Juni 1, 2025), <https://doi.org/10.59896/gara.v19i2.272>.

Alimudin, Galu Cika, “Kontroversi KUHAP Terbaru: Perbandingan Kewenangan Jaksa dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3, (Mei 5, 2025), <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.949>.

Andriansyah, Fery and Anom Wahyu Asmorojati, “Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Lex Renaissance* 10, no. 1, (November 5, 2025), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art10>.

Astaman, Ruslan Renggong, and Basri Oner, “Penyelidikan Kepolisian Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi”, *Indonesiao Journal of Legality of Law* 6, no. 1, (Desember 5, 2023): 144-145, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3834>.

Azzahra Syifa, Irsyad Aleksa, and Nazwan Aulia, “Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 2, (Mei 24, 2025): 837-838, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1150>.

Barahama, Matrial, Adensi Timomor, and Arthur Novy Tuwaidan, “Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, *At- Tanwir Law Review* 5, no. 1, (diakses pada 8 Februari 2026): 281, <https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v5i1.4315>.

- Butar, Yogi Yahya, *Peranan Kepolisian dalam Penegakan Huukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia*, (Tesis, Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2026), 5, <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5502>.
- Fariaman, Laia, and Laka Dodo Laia, “Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking”, *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2, (Agustus 30, 2023), 42: <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.979>.
- Fariaman, Laia, and Yonathan Sebastian Laowo, Dikir Dakhi, “Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Tinjau dari Data Kriminologi”, *Jurnal MathEdu* 5, no. 3, (November 3, 2022), <http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu>.
- Hamaminata, Gani, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4, (Agustus 3, 2024), <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.
- Hasanah, Rina, Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no.3, (Desember 28, 2023): 15, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>.
- Herman and Oheo Kaimuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Halu Oleo Legal Research* 7, no. 1, (diakses pada 8 Februari 2026): 240.
- Indiva, Shiva, Kamri Ahmad, and Hardianto Djanggih, “Peran dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Dialogica* 1, (diakses pada 18 Februari 2026), <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1494/488>.
- Ismaidar, and Bonar Yudhistira, “Kewenangan Bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2, no. 2, (April 2025).
- Kania Annisa Putri, et al, “Analisis Dampak Wewenang Polisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12, (Juni 16, 2024): 40, <https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000>.
- Karunia, Ana Aniza, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1, (2022), <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.

- Masinambow, Valentine, Michael Barama, and Noldy Mohede, “Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Modal Kerja Oleh PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 13/PID.PRA/2020/PN/LBO)”, *Lex Administratum* 11, no. 2, (Desember 1, 2023): 3-7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45676/41001>.
- Mohd. Yusuf DM, “Analisis Terhadap Pembatasan dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian di Indonesia”, *Milthree Law Journal* 1, no. 2, (Juli 5, 2024), <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/6374/5096>.
- Mustaqim, Farid Nur, et al, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Perspektif Teori Lawrence”, *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2, (Desember 28, 2024): 157, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3595>.
- Ni Putu Loka Chindiyana Dewi, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, “Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1, (Maret 19, 2021), <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3056.119-124>.
- Noer Diana Errika, Muhammad Andri, and Tri Susilowati, “Peran Jaksa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Justicia Journal* 14, no. 1, (Maret 27, 2025), <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14110>.
- Parulian, Herikson, Marlina, dan Muaz Zul, “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pasc Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2, (2019), <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.116>.
- Pradita, Ajeng Sekar, “Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/Puu/Xxi/2023”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3, (Agustus 11, 2024), <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7251>.
- Pratama, Nova Indra, “Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”, *Airlangga Development Journal*, (diakses pada 21 Februari 2026), <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/31901/16556>.

- Prawoko, Adtila et al, "Proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Wewenangnya dalam Hukum Acara Pidana", *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4, (Desember 12, 2023).
- Putri, Risqiana Sunaryo, Kadi Sukarna, and Kukuh Sudarmanto, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Juridisch* 1. no. 3, (Desember 3, 2023), <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7919>.
- Rahman, Faiz Aulia and Irwan Triadi, "Perbandingan Antara Suap dan Gratifikasi Terkait Penerapan Pasal 11 dan Pasal 122B UU Tipikor", *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (Desember 31, 2025): 121, <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1935>.
- Safitri, Andin Dwi, Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Judiciary Jurnal Hukum dan Keadilan* 14, no. 1, (Juni 12, 2025), <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.
- Salsabila, Putri Afra, and Shindra Zahra Gelista, dan Sulistiasih, "Efektivitas Wewenang Polisi dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 3, (Juni 23, 2024): 512, <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/138/152>.
- Sekarsari, Dila May, I Nyoman Gede Sugihartha, and I Made Minggu Widyantara, "Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3, (December 6, 2022): 581, <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5581.578-584>.
- Sulastryani and Hisma Kahman, "Analisis Yuridis Peran Penyidik Kepolisian RI dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di SMAN 1 Luwu Utara", *Jurnal Tociung Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2, (Agustus 28, 2024): 97, <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i2.2889>.
- Susilo, Endar, "Kajian Tujuan dan Asas Hukum Acara Pidana: Pilar Utama Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Thengkyang*, 9, no. 1, (July 26, 2024).
- Trias, Saputra, and Jatarda Mauli Hutagalung, "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses of Law, *Iblam School of Law* 2, no. 2, (Mei 5, 2022): 3, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66>.

Wiryadi, Uyan, Fadhila Gifari, and Hery Chariansyah, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru”, *Begawan Abioso* 14, no. 2, (Desember 31, 2023), <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.797>.

Yuliasuti, Eka, “Problematika yang dihadapi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *AL-WATHAN: Jurnal Ilmu Syariah*, 1, no. 1, (Februari 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Internet/Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2025), Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada 9 Desember 2025.

Syah, Zararah Azhim, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024”, Indonesia Corruption Watch, September 2025, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>, diakses 28 Oktober 2025.